

ANALISIS WACANA PADA PEMBERITAAN “TUJUH BULAN TAK DITANGANI, WARGA GERAM JALAN JEBOL DI JALUR GIANYAR– KLUNGKUNG”

Ni Kadek Arie Susanti
Universitas Udayana
kdarie571@yahoo.com*

I Wayan Putrawan
Universitas Udayana
kayanputrawan@gmail.com*

Abstrak

Media sosial lokal memiliki peran strategis dalam membentuk arus informasi mengenai kondisi sosial, kebijakan publik, dan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Dan dalam konteks lokal Bali, media sosial berperan sebagai medium alternatif dalam menyuarakan isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana kritik publik terhadap kerusakan jalan di jalur Gianyar–Klungkung pada unggahan media sosial Info Baline Jani. Secara diskursif, teks unggahan tersebut menampilkan pilihan leksikal dan struktur kalimat yang menekankan durasi waktu, emosi warga, serta ketidakresponsifan pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data berupa judul berita, *caption*, dan komentar warganet. Analisis dilakukan menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang meliputi analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan leksikon evaluatif, struktur pasif, kalimat imperatif, serta modalitas deontik dan epistemik merepresentasikan ketidakpuasan warga terhadap lambannya respons pemerintah. Wacana yang dibangun merefleksikan relasi kuasa yang timpang dan ideologi akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Fairclough, Media Sosial, Infrastruktur

Abstract

Local social media plays a strategic role in shaping the flow of information regarding social conditions, public policies, and infrastructure development at the regional level. In the local context of Bali, social media functions as an alternative medium for articulating issues that directly affect the daily lives of the community. This study aims to analyze the discourse of public criticism concerning road damage along the Gianyar–Klungkung route as presented in social media posts by Info Baline Jani. Discursively, the posts employ lexical choices and sentence structures that emphasize temporal duration, citizens' emotions, and the perceived unresponsiveness of the government. This research adopts a qualitative descriptive approach, with data consisting of news headlines, captions, and netizen comments. The analysis is conducted using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis model, which encompasses text analysis, discourse practice, and social practice. The findings indicate that the use of evaluative lexis, passive constructions, imperative sentences, as well as deontic and epistemic modalities represents public dissatisfaction with the government's slow response. The constructed discourse reflects unequal power relations and promotes an ideology of

accountability in public service delivery.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Fairclough, Social Media; Infrastructure*

1. Pendahuluan

Media sosial lokal memiliki peran strategis dalam membentuk arus informasi mengenai kondisi sosial, kebijakan publik, dan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Perkembangan platform digital telah memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga produsen informasi. Media sosial didefinisikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna menciptakan dan mendistribusikan konten secara partisipatif (Kaplan & Haenlein, 2010). Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta pengalaman terkait pelayanan publik.

Dalam konteks lokal Bali, media sosial berperan sebagai medium alternatif dalam menyuarakan isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas (1989), media sosial dapat dipahami sebagai arena diskursif tempat opini publik dibentuk melalui pertukaran wacana. Papacharissi (2010) menyebut fenomena ini sebagai *networked public sphere*, yaitu ruang publik yang dimediasi teknologi digital dan memungkinkan partisipasi warga secara luas. Melalui media sosial lokal, isu-isu yang kurang mendapat perhatian media arus utama dapat memperoleh visibilitas dan daya jangkau yang lebih besar. Akun media sosial lokal seperti Info Baline Jani berfungsi sebagai sarana jurnalisme warga (*citizen journalism*). Allan dan Thorsen (2009) menyatakan bahwa jurnalisme warga memberikan ruang bagi masyarakat non-profesional untuk melaporkan peristiwa dan menawarkan perspektif alternatif terhadap realitas sosial. Praktik ini memungkinkan terjadinya pengawasan sosial terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah (Goode, 2009). Namun demikian, teks jurnalisme warga tidak bersifat netral karena selalu diproduksi melalui pilihan bahasa dan sudut pandang tertentu.

Salah satu unggahan Info Baline Jani yang memperoleh perhatian publik adalah berita berjudul “Tujuh Bulan Tak Ditangani, Warga Geram Jalan Jebol di Jalur Gianyar–Klungkung Tak Kunjung Diperbaiki”. Unggahan tersebut menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang menghubungkan dua wilayah strategis di Bali dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam menunjang mobilitas, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, wacana mengenai kerusakan infrastruktur tidak hanya merepresentasikan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan relasi antara masyarakat dan pemerintah.

Secara diskursif, teks unggahan tersebut menampilkan pilihan leksikal dan struktur kalimat yang menekankan durasi waktu, emosi warga, serta ketidakresponsifan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk membangun representasi tertentu terhadap aktor sosial yang terlibat. Fairclough (1995) menegaskan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang tidak terlepas dari relasi kuasa dan ideologi. Dengan demikian, teks media sosial dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang berperan dalam membentuk pemaknaan sosial terhadap suatu peristiwa.

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) digunakan sebagai kerangka teoretis untuk mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks (Fairclough, 1989). Model CDA Fairclough menekankan tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji media sosial karena mampu mengungkap proses produksi makna serta keterkaitannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa CDA efektif digunakan untuk menganalisis wacana media daring dalam mengungkap representasi aktor sosial dan relasi kuasa (Wodak & Meyer, 2009; Machin & Mayr, 2012).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wacana media daring dan media sosial berperan penting dalam membangun representasi isu publik serta relasi antara warga dan pemerintah. Pertama, penelitian oleh Eriyanto (2011) yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* menganalisis pemberitaan media daring menggunakan analisis wacana kritis Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pelayanan publik dibingkai melalui pilihan leksikal evaluatif yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dan pemerintah sebagai aktor yang dinilai kurang responsif. Penelitian ini relevan karena menegaskan bahwa bahasa media daring berfungsi sebagai sarana kritik sosial terhadap kebijakan publik.

Kedua, penelitian oleh Putra dan Santosa (2017) dalam *Jurnal Linguistik Indonesia* mengkaji wacana kritik masyarakat terhadap pemerintah dalam berita online menggunakan pendekatan CDA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan struktur pasif, nominalisasi, dan penekanan temporal merupakan strategi diskursif untuk menyamakan tanggung jawab pemerintah sekaligus memperkuat posisi warga sebagai korban kebijakan. Studi ini sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti bagaimana relasi kuasa antara warga dan pemerintah direpresentasikan melalui teks media.

Ketiga, penelitian oleh Sari (2020) dalam *Jurnal Kajian Media* menganalisis unggahan media sosial terkait keluhan infrastruktur publik di Instagram menggunakan analisis wacana

kritis. Penelitian tersebut menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang artikulasi kritik warga dan alat tekanan simbolik terhadap pemerintah daerah. Bahasa yang digunakan cenderung evaluatif dan emosional untuk membangun solidaritas publik serta mendorong respons institusional. Penelitian ini relevan karena menunjukkan peran media sosial lokal sebagai arena jurnalisme warga dalam isu infrastruktur.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji wacana media daring dan kritik publik terhadap pemerintah, kajian yang secara khusus menelaah media sosial lokal berbasis wilayah dengan fokus pada isu infrastruktur daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis unggahan akun Info Baline Jani menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi warga, pemerintah, dan persoalan infrastruktur dalam unggahan Info Baline Jani menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik kritis serta memperkaya studi mengenai media sosial lokal di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena kebahasaan secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, ideologi, serta relasi kuasa yang terkandung dalam teks media sosial.

Data penelitian berupa teks unggahan media sosial akun Info Baline Jani yang membahas persoalan infrastruktur, khususnya unggahan berjudul “Tujuh Bulan Tak Ditangani, Warga Geram Jalan Jebol di Jalur Gianyar–Klungkung Tak Kunjung Diperbaiki”. Data mencakup tiga unsur utama, yaitu judul unggahan, isi teks berita, dan komentar warganet. Ketiga unsur tersebut dipilih karena merepresentasikan proses produksi wacana, penyampaian informasi, serta respons dan interpretasi khalayak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengarsipkan teks unggahan dan komentar yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan fokus analisis, yaitu representasi warga, pemerintah, dan persoalan infrastruktur. Analisis data dilakukan dengan mengikuti tiga tahapan analisis wacana

kritis model Norman Fairclough, yaitu analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pada tahap analisis teks, peneliti mengkaji aspek kebahasaan seperti pilihan kosakata, struktur kalimat, serta strategi retorik. Tahap praktik wacana berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dalam konteks media sosial. Selanjutnya, tahap praktik sosial mengaitkan wacana dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-interpretatif untuk mengungkap makna dan ideologi yang bekerja di balik teks.

3. Hasil

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis menggunakan model Fairclough, penelitian ini menunjukkan bahwa judul berita, *caption* unggahan, dan komentar warganet secara konsisten membangun representasi pemerintah sebagai aktor yang memiliki kewenangan struktural namun dinilai tidak responsif terhadap persoalan infrastruktur publik. Pada level teks, temuan analisis memperlihatkan dominasi leksikon evaluatif negatif, penggunaan struktur pasif yang mengaburkan pelaku, kalimat imperatif baik eksplisit maupun implisit, serta modalitas deontik dan epistemik yang mengekspresikan tuntutan, harapan, dan kecurigaan masyarakat. Bahasa satiris dalam *caption* dan gaya informal dalam komentar warganet berfungsi sebagai strategi linguistik untuk memperkuat kritik, menegaskan urgensi bahaya, serta melegitimasi pengalaman warga sebagai dasar tuntutan perbaikan jalan.

4. Pembahasan

Berdasarkan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang merupakan pendekatan yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral. Fairclough (1995) menegaskan bahwa wacana memiliki peran penting dalam membentuk, mempertahankan, maupun menantang relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, CDA tidak hanya berfokus pada struktur linguistik teks, tetapi juga pada proses sosial yang melingkupi produksi dan pemaknaan teks tersebut. Model analisis wacana kritis Norman Fairclough menempatkan wacana dalam hubungan dialektis dengan struktur sosial. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh konteks sosial, sekaligus berkontribusi dalam membentuk realitas sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi serta bagaimana ideologi bekerja melalui bahasa dalam praktik komunikasi, termasuk dalam media sosial.

Menurut Fairclough (1995), wacana memiliki tiga dimensi utama, yaitu:

1. Teks (*Text Analysis/Deskripsi*)

Dimensi teks berfokus pada analisis unsur kebahasaan yang tampak secara langsung, seperti kosakata, gramatika, struktur kalimat, kohesi, serta elemen retorik. Analisis pada tahap ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana peristiwa, aktor sosial, dan tindakan direpresentasikan melalui pilihan bahasa tertentu (Fairclough, 1995).

2. Praktik Wacana (*Discourse Practice/Interpretasi*)

Dimensi praktik wacana membahas proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Pada tahap ini, teks dipahami sebagai hasil dari praktik sosial tertentu dan dikaitkan dengan bagaimana teks diproduksi oleh penulis serta ditafsirkan oleh pembaca atau khalayak. Dalam konteks media sosial, praktik wacana mencakup peran akun pengelola dan respons warganet terhadap unggahan (Fairclough, 1995).

3. Praktik Sosial (*Sociocultural Practice/Eksplanasi*)

Dimensi praktik sosial mengaitkan wacana dengan konteks sosial, budaya, politik, dan ideologi yang lebih luas. Analisis pada tahap ini bertujuan menjelaskan bagaimana wacana berhubungan dengan struktur kekuasaan, kebijakan publik, serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, wacana dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar dan memiliki implikasi ideologis tertentu (Fairclough, 1995).

Ditemukan beberapa data yang dianalisis menggunakan teori tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

Data 1: Judul Berita

“Tujuh Bulan Tak Ditangani, Warga Keluhkan Jalan Jebol di Jalur Gianyar–Klungkung”

a. Analisis Teks

Judul ini menonjolkan unsur temporal melalui frasa “tujuh bulan” yang berfungsi sebagai penanda durasi keterlambatan penanganan. Penggunaan bentuk pasif “tak ditangani” mengaburkan subjek pelaku, namun secara implisit mengarah pada pemerintah sebagai aktor institusional yang memiliki kewenangan atas perbaikan infrastruktur. Frasa “warga keluhkan” menempatkan warga sebagai aktor sosial yang aktif menyuarakan persoalan sekaligus sebagai pihak yang terdampak langsung.

Dari sisi fitur linguistik, judul menggunakan evaluasi leksikal negatif dan struktur pasif sebagai strategi kritik tidak langsung. Tidak ditemukan modalitas eksplisit, tetapi penekanan durasi waktu berfungsi sebagai penilaian implisit atas kelalaian. Ideologi yang mulai dibangun

adalah ideologi akuntabilitas negara terhadap pelayanan publik.

Aktor: warga, pemerintah (implisit)

Ditujukan kepada: publik luas dan pemerintah

Ideologi: tanggung jawab dan kewajiban negara

b. Praktik Wacana

Judul diproduksi oleh akun media sosial lokal Info Baline Jani sebagai bagian dari praktik jurnalisme warga. Judul ini didistribusikan melalui media sosial untuk menarik perhatian publik dan memicu respons kolektif. Konsumsi judul diarahkan pada pembentukan persepsi bahwa pemerintah lalai dalam menangani persoalan infrastruktur.

c. Praktik Sosial

Secara sosial, judul merefleksikan relasi kuasa yang timpang antara warga dan pemerintah. Pemerintah direpresentasikan sebagai aktor dominan secara struktural, tetapi diposisikan lemah secara diskursif akibat kritik publik (Fairclough, 1995).

Data 2: Caption Unggahan dan Isi Berita

Data 2.1 Judul Caption

“*SING VIRAL SING MEBENIN (TIDAK VIRAL TIDAK DIPERBAIKI)*”

a. Analisis Teks

Caption “*SING VIRAL SING MEBENIN (TIDAK VIRAL TIDAK DIPERBAIKI)*” menggunakan bahasa Bali yang bersifat satiris dan ideologis. Ungkapan ini mengandung imperatif implisit, yaitu desakan agar pemerintah segera bertindak setelah isu menjadi viral. Penggunaan bahasa lokal memperkuat solidaritas antara produsen teks dan audiens.

Dalam isi berita, leksikon seperti “tak kunjung mendapat perbaikan”, “pembatas darurat”, dan “potensi bahaya” menunjukkan evaluasi leksikal negatif. Modalitas deontik tampak dalam kutipan “apa pemerintah tunggu korban jiwa dulu baru bergerak”, yang menilai bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat. Kutipan warga (I Wayan Artana dan Ni Luh Sulastri) berfungsi sebagai legitimasi pengalaman empiris.

Aktor: warga, akun sosial media, pemerintah (absen)

Ditujukan kepada: pemerintah dan publik

Ideologi: kritik terhadap pemerintahan reaktif, keadilan pelayanan publik

b. Praktik Wacana

Teks diproduksi dengan memusatkan suara warga sebagai sumber utama. Ketiadaan pernyataan resmi pemerintah menjadi strategi diskursif yang memperkuat citra

ketidakresponsifan. Distribusi melalui media sosial membuka ruang interaksi dua arah dan memperluas wacana melalui komentar.

c. Praktik Sosial

Dalam konteks sosial, wacana ini berkaitan dengan isu keselamatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jalan direpresentasikan sebagai infrastruktur vital. Ideologi dominan adalah tuntutan akuntabilitas dan perlindungan keselamatan warga (Fairclough, 1995).

Data 2.2 Kalimat 14

“Warga pun mendesak agar Pemkab Klungkung dan Pemprov Bali turun tangan segera”

a. Analisis Teks

Kalimat “Warga pun mendesak agar Pemkab Klungkung dan Pemprov Bali turun tangan segera” menggunakan struktur deklaratif yang mengandung makna imperatif implisit. Verba *mendesak* merepresentasikan tindakan verbal yang kuat dan menunjukkan posisi warga sebagai subjek aktif yang menuntut tindakan konkret. Partikel *pun* berfungsi sebagai penanda kelanjutan wacana, yang mengaitkan kalimat ini dengan konteks ketidakpuasan sebelumnya dan memperkuat kesan eskalasi tuntutan.

Penyebutan aktor institusional secara eksplisit, yaitu *Pemkab Klungkung* dan *Pemprov Bali*, menunjukkan strategi diskursif penunjukan langsung pihak yang bertanggung jawab. Frasa *turun tangan segera* mengandung modalitas deontik yang menekankan kewajiban moral dan administratif pemerintah untuk bertindak cepat. Pilihan leksikal ini membangun representasi pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa sekaligus tanggung jawab atas penyelesaian masalah.

Aktor: warga, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Provinsi Bali

Ditujukan kepada: pemerintah daerah (Pemkab dan Pemprov) serta publik

Ideologi: partisipasi warga, tuntutan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah

b. Praktik Wacana

Teks ini diproduksi sebagai bagian dari narasi jurnalisme warga yang menempatkan suara masyarakat sebagai pusat wacana. Penyebutan langsung institusi pemerintah berfungsi sebagai strategi tekanan simbolik agar tuntutan warga memperoleh legitimasi dan visibilitas publik. Dalam praktik distribusinya melalui media sosial, kalimat ini berpotensi memicu interaksi lanjutan berupa dukungan, penegasan ulang tuntutan, atau bahkan respons resmi dari pemerintah, sehingga memperluas sirkulasi wacana kritik.

c. Praktik Sosial

Pada tingkat praktik sosial, wacana ini merefleksikan relasi kuasa yang dinamis antara warga dan pemerintah dalam konteks tata kelola infrastruktur publik. Warga direpresentasikan sebagai agen sosial yang aktif dan memiliki kesadaran hak atas pelayanan publik yang layak. Sementara itu, pemerintah diposisikan sebagai pemegang otoritas yang diharapkan responsif terhadap tekanan publik. Ideologi yang bekerja adalah demokrasi partisipatif, di mana media sosial menjadi sarana bagi warga untuk menuntut akuntabilitas dan percepatan tindakan pemerintah (Fairclough, 1995).

Data 3: Komentar Warganet

Data 3.1 Komentar @alitbastard

“bupati baru kemana yaa? serius nanya, jalan *sengengah* (terlihat jelas) dan dekat kota aja nda diliat”

a. Analisis Teks

Komentar ini menggunakan kalimat interogatif retoris sebagai bentuk kritik. Diksi informal dan sindiran menandai evaluasi negatif terhadap figur pemimpin daerah. Tidak ada modalitas eksplisit, tetapi fungsi pragmatismenya bersifat imperatif tidak langsung.

Aktor: warganet, bupati

Ditujukan kepada: bupati/pemimpin daerah

Ideologi: delegitimasi kepemimpinan yang dianggap abai

b. Praktik Wacana

Komentar ini memperluas fokus kritik dari institusi ke figur personal.

c. Praktik Sosial

Komentar ini mencerminkan penggunaan media sosial sebagai sarana mempertanyakan legitimasi kekuasaan (Fairclough, 1995).

Data 3.2 Komentar @gungdyh

“Tolong segera mungkin di benerin ya kepada pihak berwenang...”

a. Analisis Teks

Komentar ini menggunakan imperatif eksplisit yang dimitigasi melalui kata “tolong”. Modalitas deontik menunjukkan harapan normatif agar pemerintah bertindak. Bahasa persuasif menunjukkan posisi subordinat warga.

Aktor: warga, pihak berwenang

Ditujukan kepada: pemerintah

Ideologi: ketergantungan warga pada negara

b. Praktik Wacana

Komentar ini berfungsi sebagai bentuk partisipasi konstruktif.

c. Praktik Sosial

Menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dalam pengambilan keputusan publik.

Data 3.3 Komentar @dekherman

“sepertinya belum balik modal...”

a. Analisis Teks

Komentar ini memanfaatkan modalitas epistemik melalui kata “sepertinya” dan strategi sarkasme. Bahasa ini membangun dugaan adanya kepentingan ekonomi atau politik.

Aktor: warganet, pemerintah

Ditujukan kepada: pemerintah

Ideologi: ketidakpercayaan publik terhadap kekuasaan

b. Praktik Wacana

Komentar ini memperluas wacana ke ranah kecurigaan struktural.

c. Praktik Sosial

Merefleksikan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Data 3.4 Komentar @dntndryn

“kalo malem lewat sih PR bgt...”

a. Analisis Teks

Komentar ini menggunakan pengalaman personal dan intensifier untuk memperkuat legitimasi kritik. Modalitas pengalaman menunjukkan tingkat kepastian tinggi.

Aktor: pengguna jalan

Ditujukan kepada: publik dan pemerintah

Ideologi: validasi kritik berbasis pengalaman sehari-hari.

b. Praktik Wacana

Komentar ini menguatkan narasi bahaya yang dibangun sebelumnya.

c. Praktik Sosial

Menunjukkan dampak nyata kegagalan infrastruktur terhadap mobilitas dan keselamatan warga.

Data 3.5 Komentar @pakmang

“PAD Klungkung gede, kewale sing olah e Anggo menaihin jalan, pajak tetep di tagih kewale kewajiban pemerintah tidak bisa memfasilitasi yg baik untuk publik”.

a. Analisis Teks

Pilihan leksikal: "Gede" menunjukkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) cukup, "sing olah" menunjukkan bahwa PAD tidak dikelola, dan "tidak bisa memfasilitasi yang baik" menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk. Kontras makna : Terdapat pertentangan antara "pajak tetep di tagih" dan "kewajiban pemerintah tidak bisa memfasilitasi", yang menunjukkan perbedaan antara hak masyarakat dan hak pemerintah.

Ada kritik: Kalimat ini, meskipun bersifat deklaratif, secara implisit menyalahkan pemerintah, menciptakan perdebatan tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan infrastruktur. Campuran bahasa: Penggunaan bahasa Bali (*sing, kewale, anggo*) menunjukkan kedekatan dengan lingkungan lokal dan memperkuat suara masyarakat yang sebenarnya. Fokus komentar ini adalah kritik terhadap tanggung jawab pemerintah dalam mengelola PAD untuk kepentingan publik.

b. Praktik Diskursif

Produksi wacana: Komentar kemungkinan muncul sebagai respons terhadap unggahan di media sosial yang membahas kerusakan jalan atau kebijakan daerah. Media sosial menjadi ruang partisipasi publik untuk menyampaikan kritik.

Distribusi: Komentar individu dapat berkembang menjadi opini kolektif karena platform digital memungkinkan banyak orang membacanya. Konsumsi: Komentar ini dapat ditafsirkan oleh pembaca lain sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah; ini bahkan dapat memicu diskusi lebih lanjut atau kolaborasi digital. Intinya, masyarakat menggunakan bahasa kritis untuk berdebat tentang kekuasaan di media sosial, yang berfungsi sebagai arena demokratis.

c. Praktik Sosial

Relasi kekuasaan: Masyarakat adalah penerima kebijakan, dan pemerintah mengontrol pajak dan pembangunan. Komentar ini menantang hubungan dengan meminta tanggung jawab. Ideologi: Ada ideologi good governance, yang berpendapat bahwa pajak harus sebanding dengan pelayanan publik. Ketika tidak terpenuhi, kritik muncul.

Konteks sosial: Jalan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kerusakan jalan sering menjadi tanda kegagalan pembangunan, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Makna Sosial: Komentar menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari transparansi anggaran

dan hak atas fasilitas publik

Data 3.6 Komentar @ariiii

"ngantiang pang pegat jalan e mare benain"

a. Analisis Teks

Komentar "ngantiang pang pegat jalan e mare benain" menggunakan kata-kata seperti "ngantiang", yang berarti menunggu, "pegat jalan e", yang berarti rusak atau parah, dan "mare benain", yang berarti baru diperbaiki, yang menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur telah tertunda. Dalam susunan kalimat ini, ada sindiran bahwa tindakan baru diambil setelah keadaan memburuk, yang menunjukkan kritik terhadap respons yang dianggap lambat pemerintah.

b. Praktik Diskursif

Kata-kata seperti "ngantiang" dan "benain" yang digunakan dalam bahasa daerah menunjukkan bahwa penutur terlibat dengan konteks lokal dan menunjukkan bahwa kritik berasal dari pengalaman masyarakat. Komentar yang dibuat di media sosial berfungsi sebagai cara bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

c. Praktik Sosial

Frasa "pegat jalan e mare benain" menunjukkan bahwa orang mengharapkan pemerintah untuk melakukan sesuatu sebelum kerusakan serius terjadi. Wacana ini menunjukkan hubungan antara pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan masyarakat sebagai pengguna, serta tuntutan untuk pelayanan publik yang lebih preventif dan responsif.

Data 3.7 Komentar @pt.dede0

"Nh kujang men, be viral gen tetep kal sg merunguang to"

a. Analisis Teks

Komentar, "Nh kujang men, be viral gen tetep kal sg merunguang to", menggunakan kata-kata "be viral", yang berarti sudah viral, dan "sg merunguang", yang menunjukkan kekecewaan terhadap pihak berwenang. Frasa tersebut menunjukkan bahwa respons yang diharapkan belum muncul meskipun masalah tersebut telah mendapat perhatian publik. Pilihan kata dengan nada informal menunjukkan kritik implisit terhadap tindakan atau kepedulian pemerintah yang kurang.

b. Praktik Diskursif

Penggunaan istilah "viral" menunjukkan bahwa diskusi ini berasal dari budaya digital, di mana perhatian publik sering diukur dengan jumlah informasi yang tersebar di media sosial. Kata "merunguung" menggambarkan keinginan masyarakat untuk mendapat perhatian. Komentar ini dibuat sebagai tanggapan terhadap masalah yang sedang diperdebatkan, dan mereka juga berfungsi sebagai tekanan simbolik pada pihak berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih baik.

c. Praktik Sosial

Frase "be viral gen tetep sg merunguung" menunjukkan bahwa otoritas tetap tidak responsif terhadap aspirasi publik, bahkan ketika masalah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum. Wacana ini menunjukkan hubungan antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penyampai kritik. Ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan kejujuran, kepedulian, dan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah publik.

Data 3.8 Komentar @toshiro

"kal ngantos kanti ade korban ape engken pak?"

a. Analisis Teks

Komentar "kal ngantos kanti ade korban ape engken pak?" terdiri dari kata "ngantos", yang berarti menunggu, "ade korban", yang berarti ada korban, dan "ape engken pak?", yang berarti bagaimana, pak? Kalimat ini menunjukkan kekhawatiran bahwa tindakan baru akan dilakukan setelah korban muncul, yang menunjukkan kritik terhadap penanganan masalah yang lambat. Apa yang disebut sebagai "pak" mengarah pada pihak berwenang dan menegaskan suara protes dan menuntut tanggung jawab.

b. Praktik Diskursif

Sebagai tanggapan terhadap situasi yang dianggap berbahaya, komentar ini dibuat di media sosial. Pertanyaan retorik digunakan dalam komunikasi untuk menarik perhatian orang dan memaksa mereka untuk bertindak. Penggunaan bahasa lokal menunjukkan kedekatan dengan lingkungan lokal dan memudahkan audiens memahami pentingnya pesan yang disampaikan.

c. Praktik Sosial

Frasa "ngantos kanti ade korban" menunjukkan keinginan masyarakat agar pemerintah melakukan hal-hal yang dapat mencegah korban terjadi. Wawancara ini menunjukkan

hubungan kekuasaan antara pemerintah sebagai penanggung jawab keselamatan publik dan masyarakat yang menuntut perlindungan. Komentar tersebut juga menunjukkan kesadaran masyarakat yang meningkat tentang hak atas keamanan dan dorongan untuk lebih responsif terhadap pelayanan publik.

Data 3.9 Komentar @iqbal.fadlikal

"viral dumun mare benain bli"

a. Analisis Teks

Komentar "viral dumun mare benain bli" menggunakan kata "viral dumun", yang berarti bahwa itu harus menjadi viral terlebih dahulu, dan "mare benain", yang berarti baru diperbaiki, menunjukkan bahwa ada kritik terhadap cara seseorang menangani masalah. Menurut kalimat ini, tindakan hanya dapat dilakukan setelah isu mendapat perhatian luas. Sementara kata "bli" menunjukkan konteks lokal dan memberi nuansa informal, ia tetap mengandung sindiran tentang bagaimana pihak berwenang bertindak.

b. Praktik Diskursif

Komentar ini muncul dalam budaya media sosial, di mana penyebaran informasi dianggap dapat mendorong respons pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh istilah "viral". Komentar ini dibuat sebagai evaluasi publik terhadap metode penanganan masalah dan mendukung anggapan bahwa tekanan digital meningkat sering menarik perhatian institusi.

c. Praktik Sosial

Frasa "viral dumun mare benain" mencerminkan persepsi masyarakat bahwa kekuasaan lebih responsif terhadap tekanan publik daripada kebutuhan langsung warga. Wacana ini menunjukkan relasi antara masyarakat sebagai pengawas sosial dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sekaligus menggambarkan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih cepat, peka, dan tidak bergantung pada viralitas isu.

Data 3.10 Komentar @komangadi

"hahaha aje rage pidan ngirim-ngirim barang ke Klungkung jeg keto jalan ne"

a. Analisis Teks

"hahaha aje rage pidan ngirim-ngirim barang ke Klungkung jeg keto jalan ne" dan frasa "ngirim-ngirim barang ke Klungkung" dan "jeg keto jalan ne", yang masing-masing menunjukkan keluhan tentang keadaan jalan. Kalimat ini menunjukkan kritik tidak langsung tentang kemungkinan infrastruktur yang buruk dapat mengganggu distribusi barang.

b. Praktik Diskursif

Bahasa yang santai dan lucu menunjukkan teknik komunikasi media sosial yang umum, yaitu menyampaikan kritik melalui humor agar terasa lebih ringan tetapi tetap bermakna. Bahasa lokal memperkuat konteks lokal dan menunjukkan bahwa komentar berasal dari pengalaman nyata pengguna jalan, sehingga komunitas setempat mudah memahaminya.

c. Praktik Sosial

Frase "ngirim-ngirim barang ke Klungkung jeg keto jalan ne" menunjukkan efek sosial dari infrastruktur yang buruk terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Diskusi ini menunjukkan keinginan agar pemerintah meningkatkan kualitas jalan karena terkait langsung dengan kelancaran distribusi dan kesejahteraan publik, dan juga menunjukkan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik.

5. Simpulan

Pada level praktik wacana dan praktik sosial, unggahan Info Baline Jani berfungsi sebagai ruang mediasi antara pengalaman warga dan arena publik digital. Produksi teks yang menonjolkan suara masyarakat, disertai absennya klarifikasi dari pemerintah, memperkuat narasi ketimpangan relasi kuasa antara warga dan otoritas. Interaksi warganet melalui kolom komentar memperluas wacana dari sekadar keluhan infrastruktur menjadi kritik terhadap kepemimpinan, pengelolaan anggaran, dan kepekaan pemerintah terhadap keselamatan publik. Secara ideologis, wacana ini merefleksikan tuntutan kolektif terhadap akuntabilitas negara, keadilan pelayanan publik, serta hak warga atas infrastruktur yang aman dan layak. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan warga menegosiasikan dan menantang praktik kekuasaan melalui wacana (Fairclough, 1995). Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran wacana media dalam membentuk persepsi publik terhadap permasalahan infrastruktur. Selain itu, diharapkan pihak terkait dapat lebih responsif dalam menangani kerusakan jalan sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dapat terjamin. Media diharapkan tetap menyajikan pemberitaan yang akurat dan berimbang, sementara pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan transparan dalam menangani permasalahan infrastruktur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan atau sumber data yang lebih beragam agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

- Allan, S., & Thorsen, E. (2009). *Citizen Journalism: Global Perspectives*. New York: Peter Lang.
- Eriyanto. (2011). Analisis wacana kritis pemberitaan media daring tentang pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 123–137.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Goode, L. (2009). Social news, citizen journalism and democracy. *New Media & Society*, 11(8), 1287–1305.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)
- Haryatmoko. (2016). *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): Landasan teori, metodologi, dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kridalaksana, H. (2007). *Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Machin, D., & Mayr, A. (2012). *How to do critical discourse analysis: A multimodal introduction*. Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Polity Press.
- Putra, I. G. N., & Santosa, R. (2017). Representasi kritik masyarakat terhadap pemerintah dalam berita online: Analisis wacana kritis. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 35(2), 145–160.
- Sari, N. P. (2020). Wacana keluhan publik terhadap infrastruktur dalam media sosial: Analisis wacana kritis. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 45–58.
- Sobur, A. (2015). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis*

semiotik, dan analisis framing. Remaja Rosdakarya.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.

Van Dijk, T. A. (2001). Critical discourse analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen, & H. E. Hamilton (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (pp. 352–371). Blackwell.

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.